

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

by Lppm 2022

Submission date: 30-Jun-2022 01:42PM (UTC+0700)

Submission ID: 1864913187

File name: Jurnal_Nasional_Implementasi_Pengelolaan_Alokasi_Dana_Desa.pdf (261.64K)

Word count: 5476

Character count: 43112

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Gregorius N. Masdjojo
Sugino

ABSTRACT

The central government has issued Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. This provision authorizes local governments to manage regional development, including rural development. Rural Fund Allocation Program (ADD) is one concrete manifestation of this provision. Provision of assistance intended as a fund ADD stimulant or stimulus funds to finance the village government. ADD program is expected to lead to the participation of NGOs in carrying out activities in the village, both governmental activities and the activities of rural development and empowerment of rural communities. This study examines the influence of the characteristics and capabilities of the implementing agencies, the environment, communications, organizational resources, attitudes of policies implementor's and the shape of bureaucratic structure to the ADD program implementation. The research was conducted in the villages in the subdistrict of Buaran, Pekalongan regency for the 2010 fiscal year as stated in the Report of the Local Government Publications audited by audited Supreme Audit Agency (BPK). Source of information is the program implementers of ADD in every village in the subdistrict of Buaran, some 126 people. Methods of data collection using questionnaires, designed by one dependent variable consisted of 6 indicators and 6 independent variables consisted of 41 indicators. Researchers found that there are only 2 variables that have a positive and significant relationship in the implementation of Rural Allocation Fund management in Pekalongan in 2010. These variables were communication/relationship between organizations and bureaucratic structure. Other variables, such as the characteristics and capabilities of the implementing organization has negative and insignificant relationship. Variable of environmental conditions affect positive but not significant. Then, variables of organizational resources has positive influence but not significant. While variable of attitude has negative effect but not significant. This study also reveals the importance of community involvement to reduce the work load of government.

KEYWORDS : Rural fund allocation, communication between organization, bureaucratic structure, rural development.

ABSTRAK

Pemerintah pusat telah mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan daerah, termasuk pembangunan desa. Salah satu wujud nyata dari ketentuan ini adalah lahirnya program Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian bantuan ADD bertujuan sebagai dana stimulan atau dana perangsang untuk membiayai program Pemerintah Desa. Program ADD ini diharapkan dapat memacu adanya partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di desa, baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, kondisi lingkungan, komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan bentuk struktur birokrasi terhadap implementasi program ADD. Penelitian ini dilaksanakan pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Laporan Publikasi Pemerintah Daerah yang sudah diaudit BPK. Sumber informasi adalah perangkat pelaksana ADD pada setiap desa di wilayah Kecamatan Buaran, sejumlah 126 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dirancang berdasarkan 1 variabel terikat terdiri dari 6 indikator dan 6 variabel bebas terdiri dari 41 indikator. Peneliti menemukan bahwa hanya ada 2 variabel yang memiliki hubungan positif dan signifikan pada implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2010. Kedua variabel tersebut adalah komunikasi/hubungan antar organisasi dan variabel struktur birokrasi. Variabel lain, seperti karakteristik dan kapabilitas organisasi pelaksana berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel kondisi lingkungan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kemudian, variabel sumber daya organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sementara variabel sikap berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mengurangi beban pemerintah.

KATA KUNCI: Alokasi Dana Desa (AAD), komunikasi antar organisasi, struktur birokrasi, pembangunan desa.

Gregorius N. Masdjojo

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank (FE-UNISBANK) Semarang; menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FE-UNIBRAW tahun 1990; pendidikan S2 Magister Ilmu Komputer pada FMIPA-UGM tahun 2002; pendidikan S2 Magister Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan pada MIESP-UNDIP tahun 2005; pendidikan S3 Ilmu Ekonomi pada DIE-UNDIP tahun 2010. Alamat kontak : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank, Jl. Kendeng V Bendan Ngisor, Semarang; telp.: 024-8414970, fax.: 024-8441738. E-mail: gmasdjojo@yahoo.com.

Sugino

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Lulusan S2 pada Program Pascasarjana (PPS) Program Studi Magister Sains Ilmu Manajemen Universitas Stikubank tahun Nopember 2012; telp: 0285-381000 ext. 113, HP: 08156934771. E-mail: bilibigisti@gmail.com.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan tentang desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP. Nomor 72 Tahun 2005). Dalam menjalankan kewenangannya, desa sebagai wilayah otonom harus memiliki sumber-sumber pendapatan, baik pendapatannya bersumber dari kemampuan sendiri (self fund), maupun yang berasal dari transfer (block grant fund).

Secara terinci struktur keuangan desa terdiri dari: a) pendapatan asli desa; b) bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% untuk desa dan retribusi kabupaten; c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD); d) bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah; e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 140/640 SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman ADD dari pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Pemberian ADD di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2009 tentang Keuangan Desa. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup) Pekalongan Nomor 13 Tahun 2009 tentang ADD serta teknis pelaksanaannya dibuatkan Keputusan Bupati Pekalongan tentang Petunjuk pelaksanaan ADD. Maksud pemberian bantuan ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengalokasian ADD masing-masing kecamatan dapat diketahui sebagai berikut (satuan juta). Kandangserang menerima sebesar Rp 762,390, Paninggaran menerima sebesar Rp 880,813, Lebakbarang menerima sebesar Rp 536,387, Petungkriyono menerima sebesar Rp 472,574, Talun menerima sebesar Rp 514,394, Doro menerima sebesar Rp 695,987, Karanganyar menerima sebesar Rp 784,210, Kajen menerima sebesar Rp 1.234,155, Kesesi menerima sebesar Rp 1.192,351, Sragi menerima sebesar Rp 831,941, Bojong menerima sebesar Rp 1.136,083, Wonopringgo menerima sebesar Rp 774,531, Kedungwuni menerima sebesar Rp 857,539, Karangdadap menerima sebesar Rp 556,142, Buaran menerima Rp 359,700,

Tirto menerima sebesar Rp 940,184, Wiradesa menerima sebesar Rp 573,300, Siwalan menerima sebesar Rp 701,238, Wonokerto menerima sebesar Rp 671,582. Kecamatan Buaran mendapatkan ADD terkecil yaitu hanya sebesar Rp 359,700 juta. Sedangkan terbesar diterima oleh kecamatan Kajen yaitu sebesar Rp 1.234,155 juta. Penelitian ini dilakukan pada pengelolaan ADD Tahun 2010.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang ada, Kecamatan Buaran menghadapi beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan bantuan stimulan ADD yang diterima.
- b) Pendapatan Asli Desa tidak semuanya memberikan kontribusi yang nyata bagi keuangan desa. Tanah bengkok lebih merupakan gaji atau sebagai upah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c) Kemampuan pengelola ADD baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan masih rendah;
- d) Keterlibatan komponen masyarakat dalam pengelolaan ADD kurang.
- e) Pembuatan SPJ sering mengalami keterlambatan;
- f) Partisipasi masyarakat rendah yaitu Rp 66,800 juta dari Total anggaran ADD di wilayah Kecamatan Buaran sebesar Rp 358,508 juta atau sebesar 14,46%, sedangkan dana gotong royong hanya sebesar Rp 15,500 juta atau sebesar 3,36%.

Permasalahan-permasalahan tersebut muncul disinyalir dipengaruhi oleh karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, kondisi lingkungan,

komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan bentuk struktur birokrasi. Bertitik tolak dari hal tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah, apakah karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, kondisi lingkungan, komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan bentuk struktur birokrasi mempengaruhi implementasi program ADD?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, kondisi lingkungan, komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan bentuk struktur birokrasi terhadap implementasi program ADD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana

Subarsono (2005) menyatakan bahwa karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana adalah ciri-ciri, sifat-sifat, sikap perilaku, kemampuan dan peran instansi pelaksana dalam mengimplementasikan program/kegiatan dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan.

2.2. Kondisi Lingkungan

Robbins (2003) menyatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga atau kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok publik penekan dan semacamnya.

Kondisi lingkungan dalam implementasi Program Alokasi Dana Desa yang diperlukan adalah:

- 1) Kapasitas lingkungan, yaitu kemampuan BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung Program ADD.
- 2) **Kestabilan peran BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung Program ADD.**
- 3) **Kompleksitas, yaitu banyaknya campur tangan lembaga-lembaga di luar organisasi pelaksana yang mempengaruhi Program ADD.**

2.3 Komunikasi/Hubungan antar Instansi

Menurut Widjaja (2000) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, **penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku**.

2.4. Sumber Daya Organisasi

Menurut Winarno (2002) menyebutkan bahwa sumber daya organisasi adalah sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan Program ADD yang **efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.**

2.5. Sikap

Menurut Mar'at (1982) menyatakan bahwa sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif

yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama-tama berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek-obyek lain di sekitarnya.

Widjaja (2000) menyatakan ada tiga tahapan yang harus dilalui seseorang agar dapat meningkatkan kesadarannya dalam memenuhi kewajiban :

- 1) **Spek kognitif**, yang berhubungan dengan gejala pikiran.
- 2) **Aspek afektif**, yang berkaitan dengan proses yang menyangkut perasaan tertentu.
- 3) **Aspek psikomotor**, yang berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak terhadap suatu obyek.

2.6. Struktur Birokrasi

Menurut Sutarto (1995) **organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.** Sedangkan struktur organisasi/ birokrasi adalah sebagai tata pola yang menghubungkan antara bagian - bagian kerja berdasarkan kedudukan dan jenis kewenangan pejabat, bidang-bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem manajemen dalam organisasi yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat sehat dan efisien. Struktur

organisasi sehat berarti tiap-tiap satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan antara usaha dan hasil kerja. Agar dapat diperoleh struktur organisasi yang sehat dan efisien, pada waktu membentuk harus memperhatikan berbagai asas organisasi.

2.7. Implementasi Program ADD

Menurut Wibawa (1992) implementasi program mengandung makna pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan. Implementasi dalam hal ini menyangkut proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi yang tersusun dalam prinsip manajemen (POAC).

2.8. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh Program Dana Bantuan Desa terhadap perkembangan desa di Kecamatan Stabat dilakukan oleh Sulistianto (2001). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Stabat menyatakan ada hubungan yang positif dan signifikan antara Dana Bantuan Desa dengan indikator perkembangan desa dari tahun 1995 sampai dengan tahun 1999.

Penelitian tentang pengaruh partisipasi masyarakat terhadap Program Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun dilakukan oleh Purba (2007). Hasil penelitian bahwa karakteristik umur, pendidikan serta pendapatan berpengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dapat berpengaruh dalam

keberhasilan program bantuan pembangunan desa.

Penelitian tentang implementasi pelaksanaan kebijakan alokasi dana peningkatan pembangunan kampung/kelurahan di Kota Jayapura, dilakukan oleh Mote (2007). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan alokasi dana peningkatan kampung/kelurahan di Kota Jayapura bagi aparat pelaksana di lapangan mengalami hambatan baik internal maupun eksternal, salah satunya SDM aparat kampung/kelurahan masih rendah.

Penelitian tentang implementasi kebijakan alokasi dana desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Jateng dilakukan oleh Wisakti (2008). Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan alokasi dana desa berjalan lancar namun pencapaian tujuan belum optimal.

Penelitian tentang analisis ketimpangan fiskal horisontal dan formula dana alokasi desa di Kabupaten Pekalongan Tahun 2003 dilakukan oleh Casmidi (2005). Hasil analisis pada alternatif Dana Alokasi Desa pertama terdapat 153 desa di Kabupaten Pekalongan harus mendapatkan alokasi lebih kecil dari alokasi transfer sebelumnya (Rp 40. juta) dengan indeks williamson 0,2333. Alternatif kedua konsekwensinya Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus menambah total Dana Alokasi Desa sebesar Rp 38,37 Milyar dari Dana sebelumnya Rp 10.80 Milyar jika ingin memperoleh indeks Williamson 0,0233.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung Tahun 2008 dilakukan oleh Subroto (2009). Hasil penelitian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi

Dana Desa sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan, segi hasil secara fisik sudah menunjukkan akuntabel dan transparan, namun sisi administrasi masih perlu adanya pembinaan lebih lanjut karena belum sesuai ketentuan, kendala utamanya belum efektifnya pembinaan aparat pemerintah desa dan kompetensi SDM.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menemukan pengaruh beberapa faktor (karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, kondisi lingkungan, komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan bentuk struktur birokrasi) terhadap implementasi program ADD.

3.2. Sampel Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Sumber informasi adalah perangkat pelaksana ADD pada setiap desa di wilayah Kecamatan Buaran, sejumlah 126 orang.

3.3. Data Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari para pelaksana Program ADD di desa-desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Buaran tahun pelaksanaan 2010. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dirancang berdasarkan 1 (satu) variabel terikat terdiri dari 6 (enam) indikator dan 6 (enam) variabel bebas terdiri dari 41 (empat puluh satu) indikator.

3.4. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

- H1 : Ada pengaruh positif karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana terhadap implementasi Program ADD.
- H2 : Ada pengaruh positif kondisi lingkungan terhadap implementasi Program ADD.
- H3 : Ada pengaruh positif komunikasi/ hubungan antar organisasi terhadap implementasi Program ADD.
- H4 : Ada pengaruh positif sumber daya organisasi terhadap implementasi Program ADD.
- H5 : Ada pengaruh positif sikap terhadap implementasi Program ADD.
- H6 : Ada pengaruh positif struktur birokrasi terhadap implementasi Program ADD.

3.5. Variabel dan Pengukuran

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah implementasi Program ADD. Sedangkan variabel bebas (*independent variables*) terdiri dari: karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana; kondisi lingkungan; komunikasi/hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi; sikap; dan struktur birokrasi.

Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana adalah ciri-ciri, sifat-sifat, sikap perilaku, kemampuan dan peran instansi pelaksana dalam mengimplementasikan program/kegiatan dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan (Subarsono, 2005). Dimensinya adalah ketrampilan teknis, manajerial & politis petugas; kemampuan untuk mengkoordinasi, mengontrol & mengintegrasikan keputusan; dukungan & sumber daya politik instansi; sifat komunikasi internal, Hubungan yang baik antar

instansi; hubungan instansi dengan pihak di luar pemerintahan; kualitas pemimpin instansi yang bersangkutan, komitmen petugas terhadap program, kedudukan instansi dalam hirarki sistem administrasi. Indikatornya adalah peranan BPD dan lembaga kemasyarakatan, dan kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ADD.

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu. Lazimnya lingkungan ini mencakup pemasok, pelanggan, pesaing, badan pengaturan pemerintah, kelompok publik penekan dan semacamnya (Robbins, 2003). Dimensinya adalah kemampuan BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung Program ADD; kestabilan peran BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa; banyaknya campur tangan lembaga-lembaga di luar organisasi pelaksana ADD. Indikatornya adalah kondisi ekonomi masyarakat desa; hubungan sosial kemasyarakatan di desa; situasi politik di desa; situasi Keamanan dan ketertiban kehidupan masyarakat desa; keterlibatan LSM dan ormas; tingkat kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan ADD.

Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama manusia melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Dimensinya adalah transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Komunikasi dalam organisasi

dapat dilihat dari sisi komunikasi antar pribadi dan komunikasi organisasi. Indikatornya adalah kemampuan sosialisasi, komunikasi menginformasikan perencanaan, penggunaan, pelaporan, transparansi Program ADD kepada masyarakat.

Sumber daya organisasi adalah sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Dimensinya adalah kemampuan sumber daya manusia; penyediaan fasilitas-fasilitas, keseimbangan antara pembagian anggaran & kegiatan program; ketepatan alokasi anggaran, pendapatan yg cukup untuk pengeluaran; dukungan pemimpin; dukungan pemimpin politik lokal. Indikatornya adalah jumlah dan tingkat pendidikan pengelola ADD; kemampuan pengelola; tingkat penguasaan administrasi; kemampuan penguasaan komputerisasi; kemampuan dalam membuat administrasi; ketersediaan sarana pendukung; kondisi sarana pendukung.

Sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak. Dimensinya adalah komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide dan konsep komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang, serta komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku. Indikatornya adalah masyarakat mendukung atau menolak Program ADD.

Struktur organisasi/birokrasi adalah tata pola yang menghubungkan antara bagian - bagian kerja berdasarkan kedudukan dan jenis

kewenangan pejabat, bidang-bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem manajemen dalam organisasi yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimensinya adalah adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi, Peraturan-peraturan yang sistematis. Sementara indikatornya adalah struktur organisasi pelaksana Program ADD; efisiensi dan efektivitas keanggotaannya; pembagian tupoksinya; hirarki; koordinasi pelaksana program dalam melaksanakan tugasnya masing-masing; hirarki pelaporan perkembangan pelaksana ADD; pertanggungjawaban secara hirarkhi.

Implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program. Dimensinya adalah proses melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi yang tersusun dalam prinsip manajemen (POAC). Indikatornya adalah penerapan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pelaksana Program ADD.

3.6. Metode Analisa Data

3.6.1. Metode Deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai responden dan variabel-variabel penelitian. Alat analisis yang digunakan di sini adalah jumlah sampel (n), minimum, maksimum, *mean* (rata-rata), median dan mode serta standar deviasi.

3.6.2. Metode Inferensial

Metode analisis penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Berganda. Metode ini harus memenuhi asumsi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Untuk itu diterapkan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap yaitu *editing*, *coding*, pemberian skor, tabulasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan pengujian hipotesa, peneliti menggunakan kuesioner yang berpedoman pada skala Likert lima kategori (Supranto, 1997).

3.6.3. Uji Kualitas Data

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument penelitian. Instrument dikatakan valid apabila mengungkap data yang diteliti secara tepat. Ukuran yang digunakan adalah nilai KMO (*Kaiser - Meyer - Olkin*). Syarat valid nilai KMO di atas 0,5, *Loading factor (Component matrix)* > 0,4 (Ghozali, 2011).

Uji reliabilitas adalah menguji seberapa konsisten satu atau seperangkat indikator pengukuran mengukur secara konsisten suatu konsep atau variabel penelitian. *Reliabilitas* menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrument pengukuran serta mengukur konsep studi. Batasan reliabel apabila *koefisien Cronbach's α* > 0,6 (Ghozali, 2011).

3.6.4. Uji Asumsi

Uji Normalitas adalah menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Metode pengujian normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov. Syarat nilai probabilitas yang lebih besar dari alpha data terdistribusi normal (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinieritas adalah menguji dengan maksud untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance variance inflation factor (VIF), regresi bebas dari multikolinier apabila nilai toleransi tidak melebihi nilai 1 dan VIF tidak melebihi 10 (Ghozali, 2011).

Uji heterokedastisitas adalah menguji model regresi dengan maksud untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika tetap, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dapat dilakukan dengan metode Glejser. Yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Batasan nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

3.6.5. Uji Model

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mampu menjelaskan variasi perubahan variabel dependennya. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi pula kemampuan prediktor menjelaskan terhadap prediksinya (Ghozali, 2011).

Uji F (ANOVA) untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan, dengan kriteria taraf signifikan sebesar 0,05. dan nilai F-hitung > nilai F-tabel (Ghozali, 2011).

3.6.6. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan uji secara parsial (uji t) untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan kriteria taraf signifikan sebesar 0,05 (Ghozali, 2011).

Persamaan regresi antara variabel dependent dan variabel independent sbb.

$$\text{Rumus : } Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + b_6 X_6 + e$$

Keterangan :

Y = Implementasi ADD

X1 = Karakteristik dan Kapabilitas instansi pelaksana

X2 = Kondisi lingkungan

X3 = Komunikasi/hubungan antar organisasi

X4 = Sumber daya organisasi

X5 = Sikap

X6 = Struktur birokrasi

a = Konstanta regresi

b = Koefisien regresi

e = Error

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

Kuesioner yang disebar sebanyak 126 kuesioner dan yang kembali 126. Jumlah responden tersebut laki-laki 110 orang (87,3%), perempuan 16 orang (12,7%). Responden yang mendominasi dalam penelitian ini berjenis kelamin pria. Sementara berdasarkan instansi terdiri dari 18 responden berdasarkan jabatan tiap desa.

Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan yaitu SD (17 orang), SLTP (23 orang), SLTA (56 orang), D1/D2/DD3 (12 orang), S1 (17 orang), S2 (1 orang). Dengan demikian, tingkat pendidikan responden didominasi oleh pendidikan SLTA sebanyak 56 orang atau 44,4 %. Berdasarkan jabatan, diperoleh data unsur pemerintahan desa sejumlah 42, unsur lembaga kemasyarakatan 70 dan tokoh masyarakat 14 orang. Responden berdasarkan jabatan didominasi dari unsur lembaga kemasyarakatan.

4.2. Deskripsi Variabel

4.2.1. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana

Nilai yang sering muncul jawaban responden adalah angka 4 artinya skor jawaban menyatakan setuju (skor 4). Hal ini mencerminkan bahwa BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Kades dan Perangkat desa memang mempunyai peranan penting dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengimplementasikan Program ADD. Tetapi peran BPD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pengawasan Implementasi Program ADD kecil berdasarkan pernyataan jawaban responden netral pada (KK5).

4.2.2. Kondisi Lingkungan

Jawaban responden tidak konsisten dari 7 responden menyatakan setuju selanjutnya 2 butir pernyataan tidak setuju. Tetapi secara keseluruhan variabel ini menggambarkan bahwa situasi politik di desa kondusif dengan jawaban responden setuju tetapi kepedulian masyarakat tidak memberikan peranan penting dalam implementasi pelaksanaan program ADD dari jawaban responden netral.

4.2.3. Komunikasi dan Hubungan Antar Organisasi

Berdasarkan jawaban responden diketahui hasil deskripsi variabel Komunikasi dan hubungan antar organisasi bahwa rata-rata (mean) pilihan jawaban responden berkisar pada 2,10 sampai 3,80 artinya bahwa responden menjawab butir pernyataan pada pilihan tidak setuju, netral dan mendekati setuju. Artinya kurangnya penginformasian pelaporan pelaksanaan ADD kepada masyarakat serta hubungan antar lembaga di desa kurang baik..

4.2.4. Sumber Daya Organisasi

Jawaban responden rata-rata (mean) pilihan jawaban responden berkisar pada 2,69 sampai 3,90 artinya bahwa responden menjawab butir pernyataan pada pilihan tidak setuju dan netral mendekati setuju.

4.2.5. Sikap

Jawaban responden berkisar pada 1,63 sampai 3,33 artinya bahwa responden menjawab sangat tidak setuju sampai dengan netral. Artinya kurang percaya masyarakat pada implementasi dan pengawasan yang dilakukan aparat pelaksana serta masyarakat tidak mendukung adanya program dan penggunaan ADD atau masyarakat memberikan penilaian yang negatif.

4.2.6. Struktur Birokrasi

Jawaban responden sering muncul skor 4 artinya bahwa jawaban responden paling banyak pada pilihan setuju yang mengadung pengertian mempunyai penilaian yang positif dalam mengimplementasikan program ADD.

4.2.7. Implementasi Program ADD

Jawaban paling banyak skor jawaban 4 artinya bahwa jawaban responden setuju yang mengandung pengertian bahwa pernyataan-pernyataan pada variabel Implementasi Program telah diterapkan dengan baik.

4.3. Pengujian Instrumen Penelitian

4.3.1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid. Uji validitas variabel karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana menunjukkan nilai KMO > 0,5 yaitu sebesar 0,782. Dengan demikian sampel terwakili, memiliki *loading factor* > 0,40 yang berarti variabel ini valid.

Uji validitas variabel kondisi lingkungan menunjukkan kecukupan sampel telah terpenuhi karena nilai KMO > 0,5 yaitu sebesar 0,820, dan dinyatakan valid karena memiliki *loading factor* > 0,40 (40%).

Uji validitas variabel Komunikasi/Hubungan antar ..organisasi menunjukkan kecukupan sampel telah terpenuhi karena nilai KMO > 0,5 yaitu sebesar 0,805. Variabel ini dinyatakan valid dengan *loading factor* > 0,40.

Uji validitas variabel sumber daya organisasi menunjukkan kecukupan sampel telah terpenuhi karena nilai KMO > 0,5 yaitu sebesar 0,832. Sebanyak 8 indikator dinyatakan valid, karena memiliki *loading factor* > 0,40. tetapi 1 butir pernyataan tidak valid karena mempunyai nilai/*loading factor* 0,343 atau < 0,40.

Uji validitas variabel sikap menunjukkan kecukupan sampel terpenuhi karena nilai KMO > 0,5 yaitu sebesar 0,830. dan dinyatakan valid karena memiliki *loading factor* > 0,40.

Uji validitas variabel struktur birokrasi menunjukkan kecukupan sampel telah terpenuhi karena nilai KMO > 0,5 yaitu sebesar 0,822. Variabel ini juga dinyatakan valid karena memiliki *loading factor* > 0,40.

Uji validitas variabel implementasi Program ADD menunjukkan kecukupan sampel telah terpenuhi karena nilai KMO > 0,5 yaitu sebesar 0,747. dan valid karena memiliki *loading factor* > 0,40.

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur kehandalan atau konsistensi item tersebut sebagai instrumen penelitian. Hasil pengujian Karakteristik dan kapabilitas Instansi Pelaksana (0,757), Kondisi Lingkungan (0,833), Komunikasi/Hubungan antar Organisasi (0,793), Sumber Daya Organisasi (0,835), Sikap (0,864), Struktur Birokrasi (0,846), dan Implementasi Program ADD (0,816). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel karena mempunyai *Cronbach alpha* > 0,60.

4.4. Uji Asumsi

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov menunjukkan data residual tidak terdistribusi normal. Untuk mengatasi hal tersebut maka nilai outlier (nilai ekstrem/data yang memiliki karakteristik unik yang sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya) dihilangkan. Dalam hal ini digunakan langkah penentuan nilai batas, dengan mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized (Z-Score).

Di uji normalitas kembali hasil kesalahan (Asym.Sig) memenuhi $> (0,05)/\alpha$ yaitu 0,112 maka data terdistribusi normal. Adapun data setelah nilai outlier dihilangkan tersisa 118 responden.

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan, tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil nilai VIF tidak ada variabel independen yang melebihi nilai 10 (sepuluh). Dengan demikian dapat disimpulkan, tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji heterokedastisitas juga menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas, karena tidak ada variabel independen yang signifikan yaitu semuanya di atas nilai 0,05.

4.5. Analisis Regresi, Uji Model dan Uji Hipotesis

4.5.1. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi dalam hal ini persamaan implementasi program ADD dengan variabel independent: karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana; kondisi lingkungan; komunikasi/hubungan antar organisasi; sumber daya organisasi; sikap dan struktur birokrasi. Hasil regresi adalah berikut: Regresi Linier dengan Model regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

Variabel karakteristik dan kapabilitas organisasi pelaksana dan sikap (si) mempunyai nilai *Beta Standardized Coefficients* yaitu (-0,017), dan (-0,040) dengan nilai signifikan 0,843 dan 0,590. Dengan demikian, variabel tersebut berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Variabel kondisi lingkungan, dan sumber daya organisasi, mempunyai nilai *Beta Standardized Coefficients* secara berurutan (0,115) dan (0,069) dengan nilai sig (0,257), dan (0,500). Ini berarti, variabel tersebut berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Sedangkan komunikasi/hubungan antar organisasi dan struktur birokrasi mempunyai nilai *Beta Standardized Coefficients* yaitu (0,469) dan (0,297) dengan nilai sig (0,000) dan (0,000). Ini menunjukkan, variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi program ADD.

4.5.2. Uji Model

Hasil uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) menunjukkan, pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sesuai dengan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,622 atau 62,2%. Ini berarti 6 variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat sebesar 62,2% sedangkan sisanya sebesar 37,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil uji F (ANOVA) menunjukkan, nilai F hasil perhitungan mencapai 33,069 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model valid dan dapat digunakan untuk memprediksi dalam penelitian ini.

4.5.3. Uji Hipotesis

Hasil uji hipotesis terhadap variabel karakteristik dan kapabilitas organisasi pelaksana menunjukkan, variabel ini memperoleh nilai *Beta Standardized Coefficients* -0,017 dan signifikansinya 0,843. Ini berarti, secara parsial variabel tersebut berpengaruh negatif dan tidak signifikan. sehingga hipotesis pertama ditolak.

Hasil uji hipotesis terhadap variabel kondisi lingkungan dengan nilai *Beta Standardized Coefficients* 0,115 dan signifikansinya 0,257. Ini berarti, secara parsial variabel tersebut berpengaruh positif tetapi Tidak Signifikan, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Hasil uji hipotesis terhadap variabel komunikasi/hubungan antar organisasi menunjukkan nilai *Beta Standardized Coefficients* 0,469 dan signifikansinya 0,000. Ini berarti, secara parsial variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Hasil uji hipotesis terhadap variabel sumber daya organisasi menunjukkan nilai *Beta Standardized Coefficients* 0,069 dan signifikansinya 0,500. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel tersebut berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Hasil uji hipotesis terhadap variabel Sikap menunjukkan nilai *Beta Standardized Coefficients* 0,040 dan signifikansinya 0,590. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial sikap berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, sehingga hipotesis ketiga ditolak.

Hasil uji hipotesis terhadap variabel struktur birokrasi menunjukkan nilai *Beta Standardized Coefficients* 0,297 dan signifikansinya 0,000. Ini berarti, secara parsial variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Dari 6 variabel yang digunakan sebagai indikator, hanya 2 variabel yaitu variabel komunikasi/hubungan antar organisasi dan variabel struktur birokrasi menunjukkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi program ADD. Sedangkan variabel yang lain tidak signifikan.

Hal tersebut menunjukkan tingkat komunikasi/hubungan antar instansi di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Buaran terbina dengan baik. Apabila lebih diintensifkan dan ditingkatkan serta terjaga harmonisasi, maka akan dicapai sinkronisasi program guna meningkatkan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan program ADD tersebut.

Hasil uji hipotesis menunjukkan, variabel struktur birokrasi berpengaruh positif dan signifikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi program ADD di Wilayah Buaran memang perlu dibuatkan pembagian tugas yang jelas, adanya hirarkhi yang pasti dalam struktur, pembagian kewenangan, tanggung jawab sehingga jelas apa yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing keanggotaan pelaksana program ADD.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

- Karakteristik dan kapabilitas organisasi pelaksana berpengaruh negatif dan tidak signifikan.
- Kondisi lingkungan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.
- Komunikasi/hubungan antar organisasi berpengaruh positif dan signifikan.
- Sumber daya organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.
- Sikap berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan.
- Struktur birokrasi berpengaruh positif dan signifikan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa ternyata pengelolaan keuangan daerah tidak hanya tingkat provinsi dan kabupaten dan kotamadya tetapi di tingkat desa perlu mendapatkan perhatian yang serius karena hal tersebut menyangkut pembangunan desa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat secara langsung. Desa perlu diberikan dana stimulan dan pemberdayaan masyarakat agar mandiri sehingga mengurangi beban Pemerintah Daerah dalam pengelolaannya.

5.2. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain sampel penelitian masih terbatas. Kemudian, penelitian ini masih jarang dilakukan sehingga untuk pendalaman permasalahan masih kurang sempurna sehingga Perlu memperbanyak kajian-kajian teori. Dari sisi penggunaan variabel, jumlahnya kurang banyak dan kemungkinan kurang sesuai kondisi desa yang bersangkutan terbukti dari 6 variabel, hanya 2 variabel yang signifikan. Karena itu, untuk penelitian selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran:

- Wilayah penelitian lebih diperluas, sampel penelitian lebih diperbanyak untuk akurasi data dan waktu lebih dari satu tahun untuk memperdalam permasalahan-permasalahan.
- Memperbanyak variabel sebagai indikator untuk memperdalam kajian materinya.
- Pemberian pernyataan jawaban pada questioner perlu adanya penjelasan terlebih dahulu kepada orang yang dijadikan responden untuk akurasi data.
- Untuk pelaksana program ADD di Wilayah Kecamatan Buaran peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- Peningkatan pembinaan terutama pejabat kecamatan sebagai koordinator dan pengawas langsung ke desa-desa.
- Pelatihan bagi aparat pelaksana program ADD.
- Menjaga kondusifitas wilayah desa masing-masing, agar program ADD tetap berjalan lancar dalam mencapai tujuan.
- Perlunya penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Madekhan (2007). *Orang Desa (Anak Tiri Perubahan)*. Malang: Averoes Press.
- Brodjonegoro, Bambang (2002). *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas.
- Culla, Adi Suryadi (2002). *Masyarakat Madani, Pemikiran, Teori dan Relevansinya Dengan Cita-cita Demokrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Casmidi (2005). "Ketimpangan Fiskal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa di Kabupaten Pekalongan". Tesis pada Program Magister Ekonomika Pembangunan UGM, Yogyakarta.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwipayana, Ari dan Surtoro Eko (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment.
- Edward III, George C. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, Imam (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan (2003). *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Handono, Eddie B., et al. (2004). *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif Membangun Tanggung-gugat Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: FPPD dan FPPM.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD (2005). "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa: Pengalaman Enam Kabupaten". Makalah ini disampaikan pada

- Peremuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Haryanto, Sahrudin dan Arifuddin (2007). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Pertama). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hartono, Eko Budi (2008). "Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya dalam Program Alokasi Dana Desa". Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UNSOED Purwokerto.
- Jones, Charles (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaho, Yosef Riwu (1997). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Gravindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5*. Jakarta: LAN dan BPKP RI.
- Mar'at (1982). *Sikap Manusia: Perubahan dan Pengukuran*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Mote, Sisiia (2007). "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Peningkatan Pembangunan Kampung/Kelurahan di Kota Jayapura". Tesis pada Program Magister Administrasi Publik UGM, Jogjakarta.
- Nugroho, Riant (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Nordiawan, Deddi; Iswahyudi SP dan Maulidah Rahmawati, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pranarka dan Onny Priyono (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Purba, Baharudin (2007). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Program Bantuan Pembangunan Desa di Kecamatan Gunung Malela Kabupaten Simalungun". Tesis pada Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan USU, Medan.
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi* (Edisi Kesepuluh). Jakarta: PT. Indeks.
- Sujanto (1996). *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sidik, M. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal, 22 Maret 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- Subarsono, A.G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subroto, Agus (2009). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)". Tesis pada Program Studi Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sulistianto (2001). "Pengaruh Program Dana Bantuan Desa terhadap Perkembangan Desa di Kecamatan Stabal". Tesis pada Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan USU, Medan.
- Susilo, Aden Andri (2006). "Formula Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kebumen, 2005". Tesis pada Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Sahdan, G.; P. Iswara dan S. Zamraoni (2006). *ADD Untuk Kesejahteraan Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 Tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- Umar, Husein (2001). *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi* (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Widjaja (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi* (Cetakan Kedua). Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi (1989). *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada.
- Wirasakti, Daru (2008). "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan". Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.

Formulir Berlangganan

Nama : _____

Alamat
(Rumah/Kantor)* : _____

Kode Pos _____ Telp () _____

Mulai Edisi / No. : _____ s/d. _____

Jumlah : _____ Eksemplar setiap terbit

Masa Langganan : 1 tahun (4 Edisi) 2 tahun (8 Edisi)
Rp. 75.000,- Rp. 150.000,-

Pembayaran : Transfer ke Rekening Melalui Pos Wesel

Tersedia

| | |
|------------|--------------|
| Tahun 2004 | Rp.150.000,- |
| Tahun 2005 | Rp.150.000,- |
| Tahun 2006 | Rp.150.000,- |
| Tahun 2007 | Rp.150.000,- |
| Tahun 2008 | Rp.110.000,- |
| Tahun 2009 | Rp.110.000,- |
| Tahun 2010 | Rp.110.000,- |
| Tahun 2011 | Rp.110.000,- |

LM-FEUI
Bank BNI Cabang Kramat
Jakarta
No. Rek.: 0010 539 802

a/n : USAHAWAN
Jl. Salemba Raya 4
Jakarta 10430

(_____)
Tanda tangan / Nama Jelas)

- Catatan :**
- ❖ Pembayaran dilakukan dimuka
 - ❖ Harga sudah termasuk ongkos kirim (dalam negeri)
 - ❖ Langganan luar negeri belum termasuk ongkos kirim
 - ❖ Harga Eceran Rp. 20.000,-
 - ❖ Bukti Transfer / Pos Wesel harap dikirim melalui Fax.: (021) 315 1684
(021) 3193 1610

Silahkan kirim kembali formulir ini melalui Pos atau Fax kami (Att: Sdr. Jaka)

*) Coret yang tidak perlu

☞ Belum termasuk ongkos kirim + 20% dari bundle yang dipesan

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ journal.stieamkop.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On